

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, Habib. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2013.
- Agustina, Rosa dkk. *Hukum Perikatan*, Denpasar : Pustaka Larasan, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika, cetakan pertama*. Yogyakarta : UII Press, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly & Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2006.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta : Djambatan, 2008.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rajawali Press, 2014.
- HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta : Rajawali Press, 2015.

- Khairandy, Ridwan. *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik : Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*. Yogyakarta : FH UII Press, 2015.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2007.
- Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 1997.
- Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Yogyakarta : Cakrawala Media, 2012.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta : Rajawali Press, 1982.
- Prinst, Darwan. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung : CV. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta : FH UII Press, 2009.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung : Bina Cipta, 1989.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2001.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2005.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Susanto, Herry. *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Berkontrak*, Yogyakarta : FH UII Press, 2010.
- Untung, Budi. *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta : Andi Offset, 2015.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.*

\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

## **C. Internet**

Hukumonline “*Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat*”.  
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5816ab6ea74a7/pengertian-atribusi-delegasi-dan-mandat/>. Diakses 25 April 2019.

Hukumonline “*Wajibkan Menjadi Saksi Pada Perkara Perdata?*”,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b022ce6cfa5a/wajibkah-menjadi-saksi-pada-perkara-perdata>, Diakses 10 Mei 2019.